

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Farrel Maulidan, and Ade Mahmud, Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Belitung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), 1192—96.
- Ahmad Sulchan and Muchamad Gibson Ghani, 'Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak', 1.1 (2017), 110.
- Agustami Lubis, Triono Eddy, and Mahmud Mulyadi, 'Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.3 (2020), 607–18 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.127>>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal MHH*, 44(4).
- Akrial, Z dan Susanti, H. (2017). Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Undang- undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal UIR Law Review*, 1(2)
- Bakhri, Syaful. (2018). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media.

- Benny Sumardiana, 'Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara Dalam Pemilihan Umum', *Pandecta*, 11.1 (2016), 81–95
<<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>>.
- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196-216.
- Budiman, Arief. (2002). Teori Negara: Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3).
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska. (2013), Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr Jun.
- Dewi Permatasari Sulistyoningsih, 'Mimbar Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Juli – November 2015, Hal. 150 – 169', November, 2015, 150–69.
- Dewi Permatasari Sulistyoningsih, 'Mimbar Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Juli – November 2015, Hal. 150 – 169', November, 2015, 150–69.
- Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia and Citra Aditya Bakti, 'P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.7', 1996, 18–31.

Eko Basunando, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu', 249.1 (2015), 1–203
<[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8867%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8867/RTP 68.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8867%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8867/RTP%2068.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>.

Fahmi, Khairul. (2019). “Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Farrel Maulidan Aziz and Ade Mahmud, 'Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Belitung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), 1192.

Fitriensi, Y. N. (2023). Analisis hukum penerapan dan bentuk tindak pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017. *Mediation: Journal Of Law*, 10.

Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12 (2)

Handitya, Binov (2018). “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4

Hariman Satria, 'Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 1–14
<<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>>.

Ida Ayu Sintya Wulandari, I Wayan Rideng, and Luh Putu Suryani, 'Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu Terkait Dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.3 (2023), 354–59
<<https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8060.354-359>>.

Indrati, Maria Farida. (2014). Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cetakan Ke-13, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ilham, Ilham, Lalu Parman, and Muh. Risnain, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study Di Kota Bima Dan Kabupaten Bima), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.1 (2023).

Ilham Ilham, Lalu Parman, and Muh. Risnain, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study Di Kota Bima Dan Kabupaten Bima)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.1 (2023).

Jarnawansyah, M. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pemilihan umum menurut undang -undang nomor 7 tahun 2017. *Jurnal TAMBORA*, 7(1), 318-326

Jafar, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59—70.

Junaidi, M. (2020). Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (2).

Janedjri M. Gaffar, 2003, *Demokrasi Dan Pemilu Indonesia*, Jakarta:

Kompress

Khairul Fahmi, 'System for The Crime of Election', *Jurnal Konstitusi*, 12.2 (2015), 264–83.

Laode Muhammad Aulia, SH, *Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu Dan Pemilihan (Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Undang - Undang No. 1 Tahun 2015 Beserta Perubahannya)*.

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Resivi*. (Bandung Remaja Rosdakarya, 2009).

Mahendra, Yusril Ihza. (1996), *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.

Mardian Putra and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Menggunakan Surat Palsu Dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020)', 1.4 (2023), 34–53.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara", Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI, 1983 hlm. 328

Muhammad Oky Fauzi and Nanik Prasetyoningsih, 'Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2024), 44–52 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125>>.

Mulyadi, D. (2019). *Analisis penerapan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 14.

Muridah Isnawati, 'Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana', *Perspektif Hukum*, 2018, 294–314 <<https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>>.

Nurhidayah, Siti, Tugas Hukum Tata Negara Pengertian Dan Hasil Istilah Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Dalam Dan Luar Negeri, *SELL Journal*, 5.1 (2020), 55

Nurfaqih Irfani, (2020), "Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (3)

Oemar Seno, 1991, *Etika Professional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Rudyanti Dorotea Tobing, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2023), 309 <<https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.477>>.

Rudyanti Dorotea Tobing, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2023), 309 <<https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.477>>.

Ramadhan, Muhammad Nur. (2019). "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 6, No. 2. *Penerapan Hukuman Percobaan Dalam Penanganan Pidana Pemilu*

Rudyanti Dorotea Tobing, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2023), 309 <<https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.477>>.

Romi Maulana, 'Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.3 (2021), 135–46 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12332>>.

Rahman, Faisal. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia*. Tesis, Universitas Indonesia.

Romi Maulana, 'Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum',

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2.3 (2021), 135–46 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12332>>.

Siti Nurhidayah, ‘Tugas Hukum Tata Negara Pengertian Dan Hasil Istilah Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Dalam Dan Luar Negeri’, *SELL Journal*, 5.1 (2020), 55.

SHUTURA SHURA MELELO, ‘Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia’, 5 (2023), 1–14 <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>>.

Sonya Kusumawati, T Erwinsyahbana, and Surya Perdana, ‘Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih’, *Rio Law Jurnal*, 2 (2024) <<http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>>.

Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., & Rampadio, H. (2023). Redesain penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1005.

SH Laode Muhammad Aulia, ‘Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu Dan Pemilihan (Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Undang - Undang No. 1 Tahun 2015 Beserta Perubahannya)’.

Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, 1.1 (2017), 110

Samsu, “Metode Penelitian Metode Penelitian“, Metode Penelitian Kualitatif, 17, 2017,

Sukawati Lanang P Perbawa, ‘Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum’,
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3.1 (2019), 80
<<https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>>.

Saraswati, Indah. (2020). "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(3), 78-92

Tutik, Titik Triwulan. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.

Uu Nurul Huda, ‘Problematika Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pada Pemilu Tahun 2024’, 1.4 (2024), 4–6.

Zulharbi Amatahir, ‘Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu’, *Jurnal Media Hukum*, 11.2 (2023), 87–98
<<https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>>.

Zulharbi Amatahir, ‘Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu’, *Jurnal Media Hukum*, 11.2 (2023), 87–98
<<https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>>.

Wahyudi, Ahmad. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Pemilu di Era Digital." *Kompas*. Diakses dari: <https://www.kompas.com/>

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,

Bndung: Refika Aditama

Muridah Isnawati, 'Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi
Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana', *Perspektif Hukum*, 2018, 294–314
<<https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>>.

suminta kaka, 'Upaya Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Partai Politik
Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum', 3 (2019), 1–16.

Sudi Prayinto, 'Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019', *Electoral
Research*, 1.1 (2019), 1–18.

Zulharbi Amatahir, 'Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan
Pemilu', *Jurnal Media Hukum*, 11.2 (2023), 87–98
<<https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>>.

Zakaria, M. (2023). Penerapan hukuman percobaan dalam penanganan pidana
pemilu. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 3(1), 24.



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
T. 08883077077
soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Maiysaroh
2. NIM : 2042100025
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum
5. Pembimbing I : Sulistina, S.H.,M.H
6. Fokus Bimbingan : Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Dan Ketajaman Analisis
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
3/3 24	Proposal	Pertemuan Judul	[Signature]
5/4 24	Revisi Bab 1-41	Pertemuan Sistematika penulisan	[Signature]
10/5 24	BAB IV	Sub 6-6 24	[Signature]
30/5 24	Revisi BAB IV	Pertemuan masalah	[Signature]
16/6 24	Revisi BAB IV	masalah materi	[Signature]
30/6 24	BAB IV	Ace keseluruhan 24	[Signature]
13/7 24	BAB V	Pertemuan materi	[Signature]
18/7 24	Kesimpulan + Bab	aa.	[Signature]
21/7 24	Ace seluruh materi	Ace.	[Signature]

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal... 21 JULI 2024 :
Dosen Pembimbing I

[Signature]
SULISTINA, S.H.,M.H.



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

UU Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67251
0 9883077077
stikhum@unum.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 18 % (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **MAISYAROH**

NIM : 2042100025

Judul Skripsi : Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 11 Agustus 2024

Kepa Tim,


RM. FARUQ, S.H.I